



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	15 (<i>lima belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Hari, Tanggal	:	Kamis, 23 April 2020
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. <i>Refocusing</i> /Realokasi Anggaran Terkait Covid 19 2. Regulasi dan Deregulasi tentang Covid 19; dan 3. Aksi Langsung K/L menghadapi Covid 19
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 11.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 23 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja BKPM RI yang telah mencatatkan peningkatan realisasi penanaman modal pada triwulan I Tahun 2020 sebesar 8% dibandingkan periode yang sama di Tahun 2019 meski pada situasi wabah Pandemi Covid-19.
2. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi ditengah keterbatasan anggaran yang ada.
3. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk menyelesaikan penyusunan *big data* investasi yang akan mengintegrasikan investasi di sektor pertambangan (*blackgold*), sektor pertanian, perkebunan (*greengold*), sektor kelautan (*bluegold*) dan pariwisata dalam satu kesatuan wilayah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembangunan Indonesia lebih terarah dan terencana dengan baik. Progress penyusunan *big data* ini agar dilaporkan kepada Komisi VI DPR RI secara berkala.
4. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI menyampaikan data terbaru realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, serta insentif investasi apa saja yang telah dikeluarkan pada masa Pandemi Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI mendorong BKPM RI untuk terus melakukan pendampingan kepada calon investor baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga kepercayaan dunia usaha tetap terjaga dan realisasi investasi dapat segera menggerakkan arus perekonomian Indonesia pasca Pandemi Covid-19.
6. Komisi VI DPR RI mendorong BKPM RI untuk menata kembali strategi penumbuhan investasi dan lebih selektif dalam melakukan deregulasi dan insentif terhadap investor yang memang memiliki visi yang sama dengan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan nilai komoditas ekspor dan berdaya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja domestik, transfer teknologi dan pengetahuan, penguatan swasembada pangan dan industri hulu dalam negeri serta penumbuhan wirausaha di Indonesia.
7. Komisi VI DPR RI meminta BKPM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15:07 WIB.

Jakarta, 23 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352